

## ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA PASIEN BEDAH REKONSTRUKTIF SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DI RSUD BLAMBANGAN BANYUWANGI

Oleh: Dian Permatasari<sup>1</sup>

### INTISARI

Asas proporsionalitas dimaknai sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Asas proporsionalitas tidak menekankan pada keseimbangan hasil, namun lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Asas proporsionalitas sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan *informed consent* pada pasien bedah rekonstruktif di RSUD Blambangan Banyuwangi, agar hak dan kewajiban para pihak terbagi sesuai proporsi dan bagian masing-masing baik dalam prosedur dan formulir *informed consent* tersebut. Terbaginya hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya akan mewujudkan keadilan bagi para pihak serta tidak ada kerugian yang timbul karenanya.

Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan *informed consent* pada pasien bedah rekonstruktif di RSUD Blambangan Banyuwangi serta dokter yang melakukan tindakan kedokteran. Baik bagi pasien maupun dokter, perlindungan hukum merupakan suatu hak yang harus dihormati. Dalam pelaksanaan *informed consent* dibutuhkan adanya suatu perlindungan preventif bagi dokter maupun pasien untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan bedah rekonstruktif dan juga untuk mencegah adanya tuntutan serta gugatan dikemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan dan formulir *informed consent* pada pasien bedah rekonstruktif, juga untuk menganalisis perlindungan hukum bagi dokter dan pasien bedah rekonstruktif dalam pelaksanaan *informed consent* di RSUD Blambangan Banyuwangi. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang dilaksanakan dengan cara memadukan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan data primer yang telah diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan *informed consent* pada pasien bedah rekonstruktif di RSUD Blambangan Banyuwangi belum diterapkan dengan baik karena pada fase pembentukan *informed consent* dibuat secara sepihak oleh rumah sakit dengan tidak mengindahkan pihak lain dalam pembentukannya. *Informed consent* merupakan bentuk perlindungan hukum bagi dokter dan pasien bedah rekonstruktif di RSUD Blambangan Banyuwangi yang sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Asas Proporsionalitas, *Informed Consent*, Bedah Rekonstruktif, Perlindungan Hukum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***PROPORTIONALITY PRINCIPLE IN THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON RECONSTRUCTIVE SURGICAL MEDICAL ACTION AS A LEGAL PROTECTION IN RSUD BLAMBANGAN BANYUWANGI***

By: Dian Permatasari<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Proportionality principle is interpreted as the principle which underlines rights and obligations exchange of the parties in an agreement in accordance to the proportion or part. This principle does not emphasize on result balance, yet it emphasizes more on the proportion of rights and obligations division of the parties in the agreement. It is really important to be implemented in the implementation of informed consent for reconstructive surgery patients in RSUD Blambangan Banyuwangi, in order to make the rights and obligations of the parties divided in accordance with proportion and own parts in the procedures and informed consent forms. The divided rights and obligations of the parties in accordance with proportions or parts would realize justice for all parties and also no disadvantage would occur.*

*Legal protection is strongly required in the implementation of informed consent on reconstructive surgery patients in RSUD Blambangan Banyuwangi and doctors who performed the surgery. Both for patients and doctors, legal protection is a right that should be respected. In the implementation of informed consent, a preventive protection is needed for doctors and patients to avoid the occurrence of unwanted things during the reconstructive surgery and also to prevent the occurrence of demands and lawsuits at a later time.*

*This research aimed to analyse the implementation of proportionality principle in the implementation and form of informed consent on reconstructive surgery patients, also to analyse legal protection for doctors and reconstructive surgery patients in the implementation of informed consent in RSUD Blambangan Banyuwangi. It is an empirical juridical research conducted by combining secondary data obtained from documentation study and primary data obtained from the field. Therefore, literature study and field study were done. The implementation of proportionality principle in the implementation of informed consent on reconstructive surgery patients in RSUD Blambangan Banyuwangi had not been well implemented as in the phase of informed consent creation was unilaterally made by the hospital with disregard other parties in its creation. Informed consent is a form of legal protection for doctors and reconstructive surgery patients in RSUD Blambangan Banyuwangi that had been well done.*

*Key words: Proportionality Principle, Informed Consent, Reconstructive Surgery, Legal Protection*

---

<sup>2</sup> Student of Faculty of Law in Universitas Gadjah Mada.